

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Informasi

Aulia Ishardiyanti ^{1*} Mahmud ² Fahrul Mauzu ³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: ishardiyantia@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: mahmud@stieyapisdomp.ac.id

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia. Email: fahrulmauzu@stieyapisdomp.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: August 10, 2025

Direvisi: August 14, 2025

Disetujui: August 17, 2025

DOI :

<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.612>



ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.

Metode Penelitian: Dengan pendekatan kuantitatif melalui survei dan kuesioner terhadap aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Populasi penelitian ini adalah gabungan dari seluruh elemen aparatur desa dan masyarakat. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sebanyak 100 responden.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t (uji parsial) variabel kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Hu'u, dengan nilai Sig. sebesar $0,000 \leq 0,05$. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Hu'u, dengan nilai dengan Sig. sebesar $0,010 \leq 0,05$. Dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Hu'u, dengan nilai Sig. sebesar $0,034 \leq 0,05$. Sedangkan uji f (uji simultan) menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implikasi: Kebijakan terpadu yang secara simultan dapat meningkatkan kompetensi aparatur, partisipasi warga, dan pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci: kompetensi aparatur; partisipasi masyarakat; teknologi informasi; akuntabilitas; pengelolaan dana desa.

Pendahuluan

Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, dan desa memiliki peran kunci dalam mewujudkannya melalui pendekatan pembangunan dari bawah. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa kewenangan lebih besar, termasuk pengelolaan Dana Desa yang bertujuan untuk mendukung infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik di tingkat desa. (UU Desa 2014). Meningkatnya kucuran Dana Desa setiap tahunnya memunculkan kebutuhan mendesak akan tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Menurut Mardiasmo *et al.*, (2009), akuntabilitas sangat penting untuk memastikan

bahwa semua program dan kegiatan di desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai dengan regulasi. Jika akuntabilitas diabaikan, Dana Desa berisiko tinggi untuk diselewengkan, baik karena faktor kesengajaan maupun karena kapasitas pengelolaan yang lemah di tingkat desa.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa seringkali terhambat oleh kapasitas aparatur desa yang belum memadai. Keterampilan teknis di bidang administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan masih menjadi kendala bagi banyak perangkat desa. Riset Sanusi & Riyadi, (2023), mengindikasikan bahwa kelemahan kapasitas aparatur desa dalam bidang-bidang tersebut secara langsung berpotensi untuk mengurangi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menyoroti bahwa aparatur yang kompeten, yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai, akan lebih mampu mengelola dana desa dengan akuntabel.

Teknologi informasi berperan penting dalam mendorong akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses (Indrajit, 2006) menjadikannya sebuah kebutuhan dalam tata kelola desa di era digital. Kecamatan Hu'u di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, meskipun menerima Dana Desa, masih menghadapi masalah pengelolaan seperti keterbatasan SDM, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi keuangan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kecamatan tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa di Hu'u cenderung minim. Seringkali, musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah perencanaan dan pengawasan hanya dilaksanakan sebagai formalitas, tanpa keterlibatan nyata dari warga. Padahal, (Arnstein, 2020) berpendapat bahwa rendahnya partisipasi menghasilkan keputusan yang kurang demokratis dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kurangnya akses informasi dan budaya feodal yang masih kuat di tingkat lokal juga memperburuk kondisi partisipasi masyarakat yang rendah ini. Optimalisasi teknologi informasi yang seharusnya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa belum tercapai. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sedikit desa di Kecamatan Hu'u yang menggunakan aplikasi Siskeudes secara maksimal. Banyak desa masih mengandalkan pencatatan manual yang berisiko menimbulkan kesalahan dan menyulitkan pengawasan secara waktu nyata. Tingkat literasi digital aparatur desa yang rendah menjadi salah satu penghambat utama adopsi teknologi (Rahmawati *et al.*, 2023).

Fenomena tidak tepatnya penggunaan Dana Desa juga teramati di berbagai lokasi, termasuk di Kabupaten Dompu, terutama Kecamatan Hu'u. Merujuk pada Laporan Inspektorat Kabupaten Dompu (2023), sejumlah desa di Hu'u menunjukkan adanya masalah administrasi dan keuangan yang mengisyaratkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satu faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas adalah kompetensi aparatur desa yang masih terbatas. Kompetensi di bidang manajemen keuangan, penyusunan laporan, dan penggunaan aplikasi pelaporan masih menjadi tantangan berat bagi banyak aparat desa di Hu'u adalah Aparatur yang tidak memahami prosedur keuangan cenderung membuat kesalahan administratif, mulai dari ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban hingga pelaporan keuangan yang tidak sesuai standar (Putra, 2021). Hal ini memperbesar risiko penyalahgunaan dana dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Faktor lain yang semakin memperburuk kondisi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) untuk mempermudah dan memperjelas pengelolaan keuangan, adopsinya di desa-desa Hu'u. Masih banyak desa yang menggunakan metode manual dalam mencatat dan melaporkan keuangan desa akibat keterbatasan sarana pendukung dan rendahnya kemampuan digital para aparat desa. Padahal, penerapan teknologi informasi berpotensi meningkatkan keterbukaan, mempercepat proses penyampaian informasi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses data keuangan desa (Anindhita *et al.*, 2016). Rendahnya penerapan teknologi ini menghambat efektivitas pengawasan, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan Dana Desa melalui media sosial atau situs resmi desa turut memperburuk akuntabilitas. Dampak dari lemahnya kompetensi aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara kumulatif menyebabkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Hu'u tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, termasuk kompetensi aparatur (Sanusi & Riyadi, 2023) partisipasi masyarakat (Pebrianti, 2021). Akan tetapi, mayoritas studi tersebut dilakukan di wilayah dengan infrastruktur dan literasi digital yang relatif lebih maju, seperti di Jawa atau kota-kota besar lainnya. Hal ini menimbulkan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana ketiga variabel tersebut berperan di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda, seperti Kecamatan Hu'u di Kabupaten Dompu, yang merupakan wilayah perdesaan dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

Penelitian ini menguji pengaruh ketiga variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi secara bersamaan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam satu kerangka analisis yang komprehensif masih terbatas. Umumnya, penelitian hanya memfokuskan pada satu atau dua variabel saja, sehingga belum memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antar faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam literatur dengan meneliti secara menyeluruh pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Hu'u, yang masih jarang menjadi fokus penelitian sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan membuktikan pengaruh kompetensi aparatur, keterlibatan masyarakat, serta implementasi teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Hu'u. Secara spesifik, penelitian ini ingin memahami sejauh mana tingkat keahlian aparatur desa memengaruhi akurasi pengelolaan keuangan, bagaimana partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pengawasan berdampak pada transparansi, serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini untuk memberikan gambaran berdasarkan data lapangan mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program peningkatan kemampuan aparatur, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi penggunaan teknologi di tingkat desa, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kecamatan Hu'u. Urgensi penelitian ini didasari oleh krusialnya mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, mengingat jumlah anggaran besar yang setiap tahun disalurkan pemerintah pusat ke desa-desa. Di Kecamatan Hu'u, berbagai persoalan terkait pengelolaan Dana Desa masih ditemukan, seperti ketidakakuratan administrasi, rendahnya partisipasi warga, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan. Situasi ini tidak hanya berisiko menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor

utama yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan memahami secara mendalam kontribusi kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan peningkatan kapasitas desa. Tujuannya adalah untuk mendorong praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Human Resource Competency Theory

Menurut teori "Ladder of Citizen Participation" yang digagas oleh (Arnstein, 2020) partisipasi publik memiliki berbagai tingkatan, mulai dari level terendah yang bersifat semu (manipulasi) hingga level tertinggi di mana warga memiliki kontrol penuh atas keputusan. Dalam konteks Dana Desa, partisipasi yang efektif terjadi ketika masyarakat bergerak naik pada "tangga" tersebut. Ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam musyawarah desa, pengawasan terhadap jalannya pembangunan, dan pemantauan laporan keuangan. Keterlibatan aktif ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial (social control) yang esensial. Sebagaimana dikemukakan oleh (Thybah *et al.*, 2024), semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, semakin kecil pula peluang terjadinya penyelewengan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat secara langsung dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur desa. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat berbasis komputer yang dimanfaatkan untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat. Menurut (Naibaho, 2017) dalam Theory of Technology Acceptance Model (TAM), manfaat yang dirasakan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) memengaruhi tingkat penerimaan teknologi. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi sistem informasi seperti Siskeudes bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan desa untuk menyajikan data keuangan secara langsung (real-time), mempermudah proses pelaporan, serta memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas karena pengawasan dapat dilakukan secara lebih terbuka dan efisien (Rahmawati *et al.*, 2023).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi Aparatur merujuk pada kemampuan fundamental yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pengelolaan Dana Desa secara efektif dan akuntabel. Menurut (Sedarmayanti, 2001), kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang berkorelasi langsung dengan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menjalankan seluruh prosedur administrasi, keuangan, dan pelaporan Dana Desa secara lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi Masyarakat



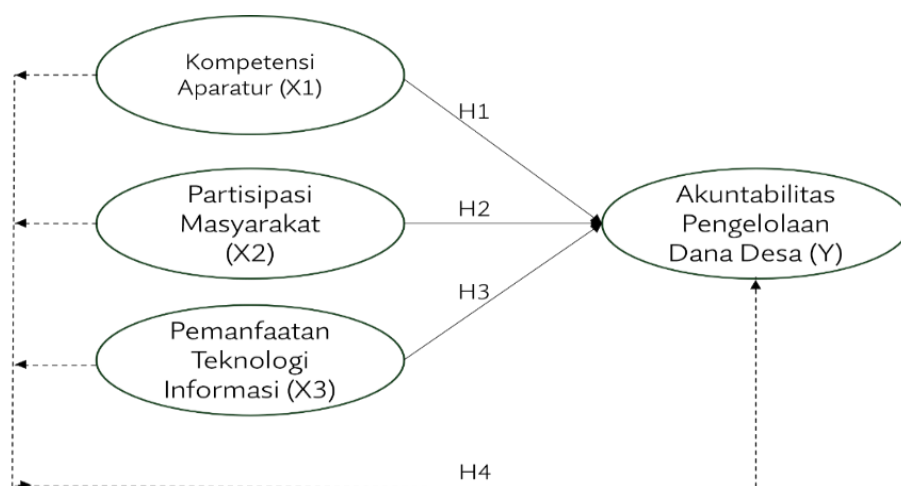
Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif dan sukarela warga desa dalam keseluruhan siklus pembangunan yang didanai oleh Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurut teori partisipasi yang dikemukakan oleh (Arnstein, 2020) tingkat partisipasi dapat bervariasi, dari yang sifatnya semu (manipulasi) hingga kontrol penuh oleh warga. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang krusial untuk mendorong transparansi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi mencakup aplikasi berbagai alat dan teknik berbasis komputer untuk memecahkan masalah, memfasilitasi komunikasi, mendukung pengambilan keputusan, dan menciptakan nilai tambah dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, mempermudah pelaporan, dan mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat. Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi oleh pengguna (Naibaho 2017).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah kewajiban hukum dan moral bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan evaluasi. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat dan pihak berwenang. Menurut Mardiasmo, (2021) akuntabilitas sektor publik menuntut penyampaian laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat diakses oleh publik.



Gambar 1. Kerangka konseptual

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas (H1)

Kompetensi aparatur yang tinggi mencakup pemahaman regulasi, keterampilan teknis dalam administrasi keuangan, serta sikap kerja yang profesional dan berintegritas secara positif memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, semakin kompeten aparatur desa, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat dicapai.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas (H2)

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari pemerintah desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas (H3)

Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi keuangan desa (Siskeudes), website resmi, dan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penggunaan teknologi ini meningkatkan transparansi melalui penyebaran informasi secara real-time serta mempermudah proses pelaporan dan pengawasan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan Dana Desa). Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang dipilih karena masih ditemukan tantangan dalam pengelolaan Dana Desa secara akuntabel. Populasi penelitian ini adalah gabungan dari seluruh elemen aparatur desa dan masyarakat di Hu'u yang memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan Dana Desa. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sebanyak 100 responden (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, yang dirancang berdasarkan indikator setiap variabel. Variabel kompetensi aparatur diukur melalui indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja; partisipasi masyarakat melalui tingkat keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi, media sosial, dan keterbukaan data digital. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap informasi penelitian. Data yang diperoleh diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas (Glejster Test), dan uji hipotesis, dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel (Ghozali, 2018).

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel secara individu, dan uji F untuk melihat pengaruh secara bersamaan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap akuntabilitas.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel melalui penguatan kompetensi SDM, pelibatan masyarakat, dan integrasi teknologi informasi (Mardiasmo *et al.*, 2009). Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Hu'u.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil

Proses pengelolaan Dana Desa beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan lokus di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebagai wilayah perdesaan yang khas, setiap desa di Kecamatan Hu'u merupakan penerima alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan lokal, sehingga menjadikannya cerminan dari dinamika pengelolaan dana di tingkat desa secara umum.

Tabel 1. Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X1)			
X1.1	0,828	0.1966	Valid
X1.2	0,815	0.1966	Valid
X1.3	0,735	0.1966	Valid
X1.4	0,818	0.1966	Valid
X1.5	0,827	0.1966	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)			
X2.1	0,740	0.1966	Valid
X2.2	0,816	0.1966	Valid
X2.3	0,726	0.1966	Valid
X2.4	0,684	0.1966	Valid
X2.5	0,761	0.1966	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)			
X3.1	0,745	0.1966	Valid
X3.2	0,611	0.1966	Valid
X3.3	0,701	0.1966	Valid
X3.4	0,686	0.1966	Valid
X3.5	0,656	0.1966	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)			
Y1	0,854	0.1966	Valid
Y2	0,704	0.1966	Valid
Y3	0,703	0.1966	Valid
Y4	0,861	0.1966	Valid
Y5	0,800	0.1966	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Pemilihan Kecamatan Hu'u sebagai lokasi didasarkan pada tantangan nyata yang relevan dengan isu akuntabilitas. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan adanya keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan, yang diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kondisi ini semakin kompleks dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi seperti Siskeudes, yang menghambat transparansi dan efisiensi. Kombinasi ketiga faktor ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai objek studi yang krusial dan representatif.

Berdasarkan pada tabel 1, seluruh item pertanyaan pada variabel kompetensi aparatur (X1), partisipasi masyarakat (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,1966, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Std. Sig.	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X1)	0,862	≥ 60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,801	≥ 60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,71	≥ 60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,842	≥ 60	Reliabel

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa seluruh variabel kompetensi aparatur (X1) memperoleh nilai sebesar 0,862, partisipasi masyarakat (X2) sebesar 0,801, pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,710, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,842, memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari batas minimal 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan adalah reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data serta analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,8705360
Parameters a, b	Std. Deviation	,45388989
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,060
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.110c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 3, hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,110, yang lebih besar dibandingkan batas

signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi Aparatur	,146	6,861
1 Partisipasi Masyarakat	,183	5,470
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,297	3,368

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk variabel kompetensi aparatur sebesar 0,146, partisipasi masyarakat sebesar 0,183, dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,297, yang semuanya melebihi batas minimum 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel yaitu kompetensi aparatur sebesar 6,861, partisipasi masyarakat 5,470 dan pemanfaatan teknologi informasi 3,368, seluruhnya berada di bawah ambang batas 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas (Glestjer Test)

Model	Glestjer Test	Std. Sig.	Hasil Uji
1 (Constant)	,000		
Kompetensi Aparatur	,317	≥ 0.05	Bebas Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	,292	≥ 0.05	Bebas Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,084	≥ 0.05	Bebas Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser test menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel kompetensi aparatur sebesar 0,317, partisipasi masyarakat sebesar 0,292, dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,084. Seluruh nilai tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa varians residual memiliki sifat homogen pada setiap nilai prediksi variabel independen, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji t, diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki nilai t-hitung sebesar 9,973 lebih besar dari t tabel yaitu 1,661 dengan signifikansi $0,000 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,642 lebih besar dari t tabel yaitu 1,661, dengan signifikansi $0,010 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,152

lebih besar dari t tabel yaitu 1,661, dengan signifikansi $0,034 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi ini.

Tabel 6. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,721	,780		,925	,357
Kompetensi Aparatur	,668	,067	,715	9,973	,000
Partisipasi Masyarakat	,173	,065	,169	2,642	,010
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,132	,061	,108	2,152	,034

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Tabel 7. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	417,718	3	139,239	412,656	.000 ^b
Residual	32,392	96	,337		
Total	450,110	99			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai F-hitung sebesar 412,656 lebih besar dari f tabel yaitu 2,697, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 8. Koefisien Determinasi R-Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963a	,928	,926	,581

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 23, 2025

Berdasarkan tabel 8, hasil analisis koefisien determinasi r-square menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-square sebesar 0,926, yang berarti 92,8% variasi pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan sisanya sebesar 7,2% dari (100% akuntabilitas pengelolaan dana desa) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti transparansi pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang bisa mempengaruhi akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Tingginya nilai adjusted r-square ini mengindikasikan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga ketiga variabel independen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan variabel dependen.

Pembahasan

Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh signifikan ini dapat dijelaskan karena aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang baik mampu mengelola dana desa secara tepat sasaran, sesuai aturan, dan transparan. Kompetensi yang memadai juga meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi oleh Arnstein (2020), dengan konsep Ladder of Citizen Participation, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari nonparticipation, tokenism, hingga citizen power. Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai dapat mendorong partisipasi warga hingga mencapai tahap citizen power, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki peran nyata dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan teknis dalam mengelola administrasi dan keuangan, keterampilan komunikasi untuk menyampaikan informasi secara jelas dan transparan, serta integritas moral dalam mematuhi aturan dan menjunjung etika kerja. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan studi oleh Rahmawati *et al.*, (2023), yang menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara langsung.

Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat penting karena mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan transparansi, serta menciptakan pengawasan publik terhadap perencanaan dan penggunaan dana desa. Keterlibatan warga dalam proses musyawarah, pengawasan lapangan, hingga evaluasi kegiatan membuat pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (2020), dengan konsep Ladder of Citizen Participation, hasil yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mengindikasikan bahwa keterlibatan warga telah mencapai tingkat partisipasi yang substansial. Pada tingkat tertinggi, yaitu citizen power, masyarakat memiliki kendali yang nyata, mampu memengaruhi pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan, serta berperan dalam evaluasi program. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan studi oleh Kurniawan, (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan sistem informasi keuangan desa,

dan media publikasi digital memudahkan penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta meminimalisasi peluang manipulasi data. Dengan akses informasi yang cepat dan terbuka, tingkat transparansi meningkat sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa pun terjaga. Temuan ini sejalan dengan Theory of Technology Acceptance (TAM) sebagaimana dijelaskan oleh Naibaho (2017) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Teknologi akan digunakan jika dianggap bermanfaat dan mudah dioperasikan. Dalam pengelolaan dana desa, teknologi yang mempermudah administrasi, pelaporan, transparansi, dan pengawasan akan mendorong aparatur memanfaatkannya secara optimal sehingga akuntabilitas semakin meningkat. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Rahmawati *et al.*, (2023), yang menyatakan bahwa pemanfaatan informasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Signifikansi ini terjadi karena ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Kompetensi aparatur yang memadai menjamin pengelolaan administrasi dan keuangan dilakukan secara profesional, partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi, sementara teknologi informasi mempermudah pelaporan, publikasi, dan akses data keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi oleh Arnstein, (2020) dengan konsep Ladder of Citizen Participation, menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa telah berada pada tingkat partisipasi yang substansial dan memberdayakan masyarakat. Pada level tertinggi, yaitu citizen power, warga memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi program. Kompetensi aparatur yang tinggi mendukung keterbukaan informasi dan pengelolaan administrasi yang profesional, partisipasi masyarakat memastikan adanya kontrol sosial dan keterlibatan langsung dalam setiap tahap, sementara pemanfaatan teknologi informasi memperluas akses data dan transparansi publik. Sinergi ketiga faktor ini membentuk partisipasi yang kuat dan efektif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel, selaras dengan prinsip good governance.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Uji t memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen secara parsial berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, sementara uji F mengonfirmasi pengaruh signifikan secara simultan. Tingginya nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2 sebesar 0,926) mengindikasikan bahwa ketiga variabel ini secara dominan mampu menjelaskan variasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sehingga membuktikan bahwa kompetensi aparatur yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal merupakan

faktor kunci dalam menciptakan tata kelola dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis, pendampingan administrasi keuangan, serta penguatan etika kerja. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa harus dioptimalkan melalui mekanisme musyawarah yang lebih substansial, bukan sekadar formalitas. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan media publikasi digital, harus ditingkatkan agar laporan keuangan dapat diakses masyarakat secara transparan dan real-time. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan program penguatan tata kelola desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Cakupan penelitian hanya terbatas pada Kecamatan Hu'u, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain dengan kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Variabel penelitian hanya mencakup kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi, padahal masih ada faktor lain seperti sistem pengendalian internal, transparansi kebijakan, dan kepatuhan regulasi yang juga dapat memengaruhi akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) agar pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi lebih komprehensif.

Referensi

- Arnstein, S. (2020). Building "a ladder of citizen participation." In *Learning from Arnstein's Ladder: From Citizen Participation to Public Engagement* (Vol. 2).
- Desa, U.-U. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Desa – Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18(April-2), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi*. Jakarta: Aptikom.
- Kabupaten Dompu. (2023). *Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2023* (hal. 7).
- Kurniawan. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Naibaho, R. S. (2017). Peranan dan perencanaan teknologi informasi dalam perusahaan. *Warta Dharmawangsa*, (52).
- Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sumobito (Studi kasus pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito).
- Putra, M. A. A. (2021). Bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah yang tidak dapat dipidana. *Justisi*, 7(2), 118–136.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542.
- Rosqvist, T., Mardiasmo, D., & Kivits, R. (2009). Menuju perspektif terpadu tentang manajemen aset armada: Pertimbangan teknik dan tata kelola. *Queensland University of Technology*, 1553–1567.
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 91–106. <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.34>

Sedarmayanti, & Mizan, M. P. (2001). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: CV Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif dan R&D. Alfabeta.

Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Implementasi manajemen keuangan Desa Madat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Multidisipliner Knowledge*, 2(1), 33–44.

Penulis korespondensi

Mahmud dapat dihubungi di: mahmud@stieyapisdompu.ac.id